



KLIPING

BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Media cetak:

- Bangka Pos
- Babel Pos
- Babel News
- Radar Bangka
- Rakyat Pos
- Lainnya: _____

Tanggal:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									✓						
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Bulan:

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
				✓	

Thn:

2
0
1
6

Halaman:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	✓																							

PH. GUBERNUR OPTIMIS PEMROV BABEL RAIH WTP

► Terkendala Soal Aset, Disebut Klasik

PANGKALPINANG- Plt Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Yuswandi A. Tumenggung optimis, laporan hasil pemeriksaan Bapak Pemeriksa Keuangan (BPR) RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2016 dapat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Diakui Yuswandi, persoalan Pemprov Babel belum memperoleh WTP ini, salah satunya dikarenakan permasalahan aset yang masih menjadi kendala, namun ia menegaskan, jika ini dibenahi dengan baik, maka opini tertinggi ini dapat diraih.

"Sewaktu saya baru masuk ke Babel ini, pertama yang saya tanyakan ke Sekda adalah bagaimana opini BPK di pemprov ini,

dan memang hasilnya belum maksimal, ini yang akan kami konsolidasikan, melihat capain untuk dimaksimalkan," kata Yuswandi disela Sertijab Kepala BPK Perwakilan Babel, Kamis (10/11/2016).

Menurut Yuswandi, untuk kendala aset ini, ada berbagai hal yang perlu ditelusuri, apakah aset yang timbul karena daerah sebelumnya lantaran adanya otonomi daerah, berkaitan dengan BUMN, swasta atau lainnya.

"Menurut laporan ini terkait aset, inikan klasik, begitu kita sentuh akan timbul semangat untuk membenahi, kita coba dalam aset ini, apakah kaitannya daerah induk, perseroan, BUMN, kemudian kita benahi Lakip kerjasama dengan

BPKP, mungkin aset belum selesai kita dihadapkan dengan sistem baru, yang harus diikuti dalam perkembangan, banyak hal dalam penyusunan pelaporan kita diharuskan dengan pola pelaporan yang berbasis akrual," bebernya.

Sekjen Kemendagri ini menegaskan, apa yang sudah diperoleh pada tahun 2015 harus ditingkatkan lagi di tahun 2016, jangan sampai mengulangi kesalahan di tahun sebelumnya.

"Belajar dari 2015 bagaimana

kita siapkan di 2016, jangan masuk lobang yang sama. Ke depan semakin baik, indikator salah satunya adalah opini untuk LKPD semakin baik," harapnya.

Anggota V BPK RI, Moermahadi Soerja Djanegara menyebutkan, opini BPK terhadap delapan pemerintahan di Babel untuk tahun 2015 lalu mengalami perbaikan signifikan, dimana kedelapan pemerintahan ini mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), setelah sebelumnya dua kabupaten Bangka Selatan dan

Belitung Timur mendapat opini disclaimer dan tidak wajar.

"Permasalahan pengelolaan keuangan yang banyak terjadi adalah ketidak tertiban penatausahaan aset daerah, aset harus dijaga dan dicatat dengan benar, setiap tahun nilainya selalu meningkat," bebernya.

Ia berharap, agar kinerja pemerintah daerah semakin meningkat dan transparan, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah semakin baik, sesuai harapan masyarakat. (nov/10)